

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**



**KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	3
1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	4
1.4 Sistematika Penulisan	10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kineja Organisasi	30
3.2 Realisasi Anggaran	39
3.3 Inovasi	42
3.4 Penghargaan	42
BAB V PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	44
LAMPIRAN	45
a. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2025 dan PK 2026	
b. Pencana Kinerja (Renja) Perubahan 2025 dan Renja 2026	
c. Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029	
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025-2029	
e. Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja 2025-2029	
f. Rencana Aksi Tahun 2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon/Jfu	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025	5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana	6
Tabel 1.5	Rincian Anggaran sesuai Program dan Kegiatan	8
Tabel 1.6	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024	11
Tabel 1.7	Langkah Perbaikan Internal OPD Tahun 2025	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026	18
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025	20
Tabel 2.4	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025	24
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jumapolo Tahun 2025	24
Tabel 2.7	Program dan Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025	32
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun-Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra 2024 – 2026	34
Tabel 3.6	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 dan Alternatif Solusi	35
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja	38
Tabel 3.9	Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo per-Program dan Kegiatan Tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur organisasi Kecamatan Jumapolo	3
Gambar 2	Screenshot Aplikasi Smart Sakip dan ESR Menpan	29

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”(LKjIP) Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tatakepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan Jumapolo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Staf ahli Bupati.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Jumapolo melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Jumapolo, Januari 2026

CAMAT JUMAPOLO



BAMBANG SRIYANTO, S.Sos., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19681020 199603 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumapolo melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;

- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

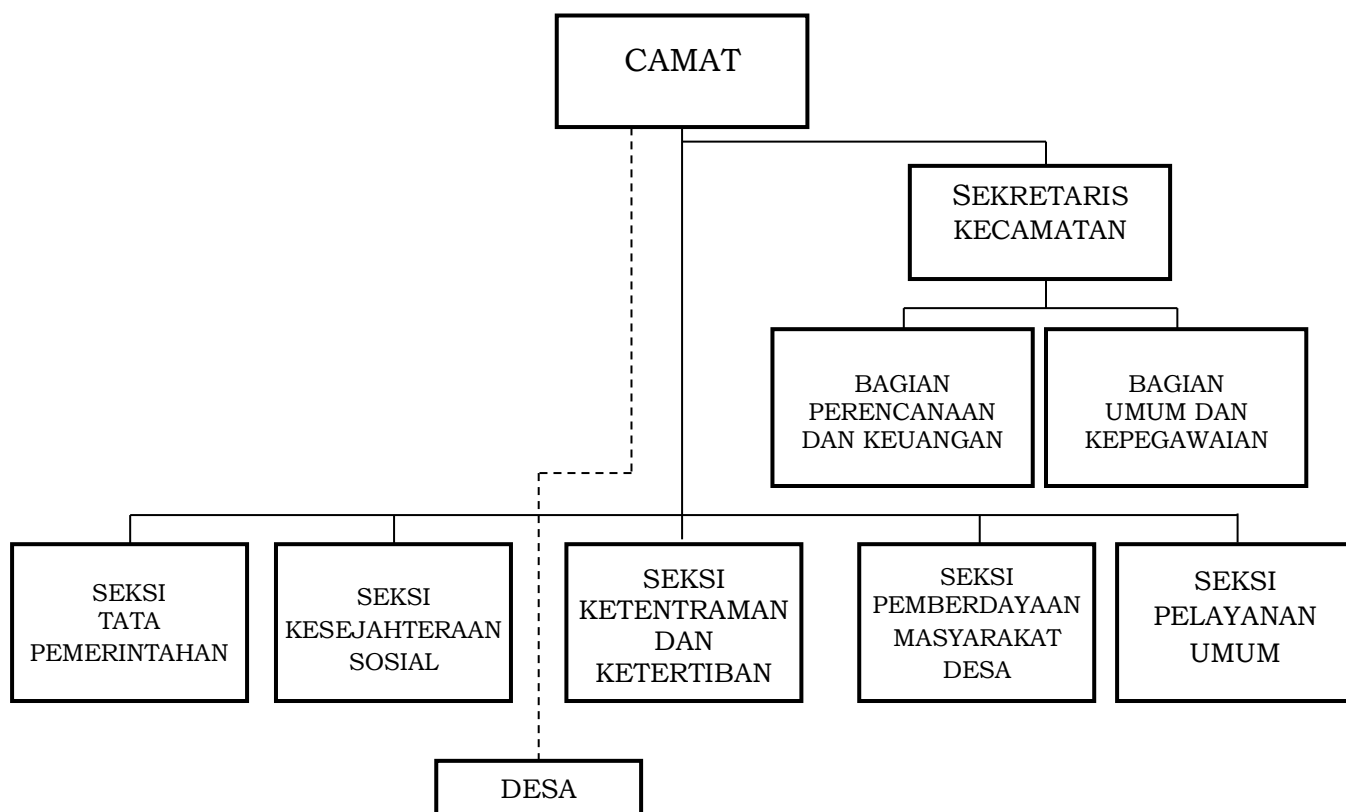
1.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Jumapolo



1.2. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;

4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;

1.3. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Jumapolo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia, berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Jumapolo per 31 Desember 2025 jumlah pegawai Kecamatan Jumapolo adalah 29 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 11 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1 orang dan Non ASN 17 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1) Pegawai menurut Jabatan/Eselon/JFU:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Non ASN pada Kecamatan Jumapolo sesuai dengan Jabatan/Eselon/JFU seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	NON JFU	Total
Camat	1	-	-	-	1
Sekretariat	-	2	3	17	22
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	2
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	1	-	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	-	2
Jumlah	1	6	5	16	29

2) Pegawai menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Jumapolo dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	-	0
2	Golongan II	0	1
3	Golongan III	6	2
4	Golongan IV	1	1
5	Golongan VII (PPPK)	-	1
6	Non Golongan	13	4
Jumlah		20	9

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo (2025)

3) Pegawai menurut Tingkat Pendidikan:

Menurut tingkat pendidikan, pegawai pada Kecamatan Jumapolo dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SD Sederajat	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0
3	SMA Sederajat	11	2	13
4	D3	1	3	4

5	S1	7	4	11
6	S2	1	0	1
Jumlah		20	9	29

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan JUMAPOLO (2025)

1.3.2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung yang ada di Kecamatan Jumapolo antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Gedung Bangunan Kantor	M2	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Lainnya	M2	1	0	0	1
3	Bangunan Tempat Parkir	M2	1	0	0	1
4	Portable Generating Set	Unit	1	0	0	1
5	Station Wagon	Unit	1	0	0	1
6	Sepeda Motor	Unit	5	2	0	7
7	Almari Besi/Metal	Unit	3	1	0	4
8	Filling Besi/Metal	Unit	6	2	4	12
9	Papan Visual	Unit	1	0	2	3
10	Peta	Unit	0	0	1	1
11	Bacdrop Aula	Unit	1	0	0	1
12	Lemari Kayu	Unit	3	1	3	7
13	Meja Kayu /Rotan	Unit	5	0	2	7
14	Kursi Besi / Metal	Unit	50	20	10	80
15	Kursi Kayu / Rotan	Unit	30	8	1	40
16	Tempat Tidur Besi/Metal	Unit	2	0	0	2
17	Meja Rapat	Unit	10	2	1	13
18	Meja Makan	Unit	1	0	0	1
19	Meja Ketik	Unit	0	0	2	2
20	Meja Resepsionis	Unit	2	0	0	2
21	Kursi Tamu	Unit	1	0	0	1
22	Kursi Putar	Unit	0	0	8	8
23	Kursi Biasa	Unit	80	5	0	85
24	Bangku Tunggu	Unit	1	0	0	1
25	Kursi Lipat	Unit	100	20	30	100

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
26	Meja Komputer	Unit	2	0	0	2
27	Meja 1/2 Biro	Unit	22	0	6	28
28	MeubelairLainnya	Unit	1	0	0	1
29	Korden	Unit	5	0	0	5
30	Rak TV	Unit	1	0	0	1
31	Jam Elecktronik	Unit	1	0	4	5
32	MesinPotongRumput	Unit	1	0	0	1
33	MesinCuci	Unit	0	0	1	1
34	Lemari Es	Unit	0	1	0	1
35	Ac Unit	Unit	3	0	1	4
36	Sofabed	Unit	1	0	0	1
37	KipasAngin	Unit	3	0	0	3
38	Kitchen Set	Unit	1	0	0	1
39	Televisi	Unit	2	0	0	2
40	Cassete Recorder	Unit	1	0	1	2
41	Amplifier	Unit	2	0	0	2
42	Loudspeker	Unit	1	0	0	1
43	Sound System	Unit	3	0	0	3
44	Ware Less	Unit	1	0	0	1
45	TiangBendera	Unit	1	0	0	1
46	Mimbar / Podium	Unit	1	0	0	1
47	Alat Rumah TanggaLainnya	Unit	3	0	0	3
48	P.C. Unit	Unit	2	1	1	4
49	Handycam	Unit	1	0	0	1
50	Lap Top	Unit	5	1	4	9
51	Personal Komputer Lainnya	Unit	0	0	1	1
52	Monitor	Unit	2	0	2	4
53	Printer	Unit	2	1	2	5
54	Meja KerjaPejabat	Unit	10	5	3	8
55	Meja Tamu Biasa	Unit	4	0	0	4
56	KursiKerjaPejabatEselon IV	Unit	0	0	5	5
57	KursiKerjaPejabat	Unit	10	0	0	10
58	Lemari BukuuntukPerpustakaan	Unit	0	0	2	2
59	Proyektor+Attachment	Unit	0	0	1	1
60	Microphone / Wireless Mic	Unit	3	0	1	4
61	Mesin Pres	Unit	0	0	1	1
62	Handy Talky (HT)	Unit	1	0	0	1
63	Facsimile	Unit	1	0	0	1
64	PenyemprotOtomatis	Unit	1	0	3	4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	(Otomatic Sprayer					
	Jumlah		404	70	103	517

Sumber : Data Aset Kecamatan Jumapolo, 2025

1.3.3. Anggaran

Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.385.141.136,- (*Dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.813.076.336,- (*Satu miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp.558.487.800,- (*Lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), serta Belanja Modal sebesar Rp. 13.850.000,- (*Tiga belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Tabel 1.5

Rincian Anggaran Sesuai Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.272.198.136
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.126.800
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.626.800
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	250.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	250.000
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.813.076.336
1.2.1	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	1.813.076.336
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	51.281.000
1.3.1	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	2.000.000
1.3.2	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	14.105.000
1.3.3	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	2.750.000
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.746.000

1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.380.000
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.700.000
1.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.150.000
1.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	13.850.000
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.850.000
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	334.750.000
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.400.000
1.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	54.114.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.194.000
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000
1.6.3	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.448.000
2.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	3.448.000
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	948.000
2.1.2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2.500.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.518.000
3.1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	4.518.000
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.518.000
3.2	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	10.000.000
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	27.850.000
4.1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	27.850.000
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.850.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.200.000
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	57.200.000

5.1.1	PembinaanPersatuan dan KesatuanBangsa	54.200.000
5.1.2	PembinaanKerukunanAntarsuku dan Intrasuku, UmatBeragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna MewujudkanStabilitasKemanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.200.000
6.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa</i>	10.200.000
6.1.1	FasilitasiPenyusunanPeraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	2.500.000
6.2.2	FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa dan Pendayagunaan Aset DEsa	7.700.000
Jumlah		2.385.414.136

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Pelaporan LKjIP Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Isu-Isu Strategis
- 1.3. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
- 1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Inovasi
- 3.4. Penghargaan

BAB IV Penutup.

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

1.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Berikut adalah tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi Sakip Tahun 2024:

Tabel 1.6

Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

No	Saran / Rekomendasi	TindakLanjut
1	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai denganmelakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi	Sudah ditindaklanjuti dengan dengan laporan hasil evaluasi administrasi keuangan setiap triwulan
2	Menyesuaikan dan menyelaraskan pencantuman Indikator Kinerja Utama pada seluruh dokumen perencanaan kinerja	Sudah ditindakluti pada semua dokumen perencanaan
3	Mengajukanpermintaan review laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan	Sudah ditindaklanjuti dengan Telah mengajukan permintaan reviu keInspektorat melalui surat permintaannomor. 900/10.1/I.2024 Tanggal 6 Januari 2025 dan telah dilakukan reviu oleh Evaluator Internal

1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

Tindak lanjut relomendasi LKjIP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

Lankah Perbaikan Internal OPD Tahun 2025

No	Uraian Rekomendasi	Bentuk Tindak Lanjut	Status TL	
			Selesai	Tdk Selesai
1.	Menyusun dan menetapkan SOP/ pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Dalam SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang. Dalam SOP pengukuran capaian kinerja agar	Dokumen SOP SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja yang telah disahkan oleh Kepala OPD.	selesai	

	dimasukkan kegiatan reviu data kinerja oleh APIP . Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja internal agar dilaksanakan mempedomani SOP dimaksud dan dilaksanakan secara berkala (bulanan/tribulan/semester/tahun an) dan berkelanjutan.			
2.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang telah diformalkan ke <i>website</i> resmi Kabupaten, <i>website</i> OPD, maupun e-SAKIP secara tepat waktu.	Screenshot telah mengupload dokumen perencanaan kinerja di website.	selesai	
3.	Mulai tahun 2024 agar menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu: 1) Melengkapi/meng-input ke dalam menu data Renstra dengan informasi: a) Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target kinerjanya masing-masing. b) Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data 2) Melengkapi/meng-input ke dalam menu progres kinerja dengan informasi: a) Tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan. b) Faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja.	Screenshot aplikasi yang sudah lengkap ter- <i>input</i> data dimaksud.	selesai	

	3) Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja. 4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP sebagai acuan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.			
4.	Melengkapi Laporan Kinerja dengan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan.	Laporan Kinerja yang memuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan	selesai	
5.	Menyelaraskan target indikator kinerja antara dokumen Renstra, Rencana Aksi Tahun 2025 dan Laporan Kinerja.	Laporan Kinerja yang target indikator kinerjanya telah selaras dengan Renstra dan Rencana Aksi.	selesai	
6.	Menyesuaikan realisasi capaian kinerja utama Tahun 2024 dan narasinya pada Laporan Kinerja.	Laporan Kinerja Bab III yang telah menyajikan realisasi capaian kinerja utama Tahun 2025 dan narasinya	selesai	
7.	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.	Surat permintaan revidi yang ditandatangani oleh Kepala OPD	selesai	
8.	Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya.	Matrik penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.	selesai	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jumapolo tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Adapun tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Kecamatan Jumapolo menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan Sasaran ke 4 yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Adapun isu strategis dalam meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi adalah:

Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Globalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan

akuntabel. Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu :

- a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan big data sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan big data akan berdampak meningkatkan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Isunya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbarukan serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Ketersediaan, kelengkapan, kebaruan, keakuratan, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, menjadi inti dari isu ini.
- b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart City*) Konsep *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota cerdas (*smart city*) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013):
 - 1) *Smart Governance* (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis *real time data*);
 - 2) *Smart Economy* (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemanfaatan *e-commerce*);
 - 3) *Smart Mobility* (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki);
 - 4) *Smart Environment* (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, *green building*);
 - 5) *Smart Branding* (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut);

- 6) *Smart People* (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan *skill* yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi);
 - 7) *Smart Living* (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah
- Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis ini karena seperti diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan pusat melalui dana perimbangan (DAU/DAK) yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, disamping juga birokrasi yang tertib, efisien dan akuntabel.
- d. Inovasi Daerah
- Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. *Spirit* SDGs menempatkan pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan sumber daya, melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi daerah, selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Karanganyar masuk dalam kategori kabupaten kurang inovatif, dan tahun 2021 mulai masuk kategori Kabupaten inovatif
- e. Pemerintah yang Kolaboratif
- Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas – Akademisi–Media, multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lain, sangat diperlukan.
- f. Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan
- Pemerintahan yang hadir menjaga konsusivitas daerah dan memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif diperlukan dalam kondisi sekarang. Kehadiran pemerintah sangat strategis di era arus informasi dan media

sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial. Peran pemerintah dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketersediaan regulasi dan penegakan regulasi sesuai kebutuhan pengarusutamaan pembangunan yaitu: (1) nilai inklusif/menghormati kesetaraan hak-hak asasi hidup manusia, (2) ramah lingkungan hidup berkelanjutan; (3) berwawasan kebangsaan, (4) pro kemiskinan (*pro poor*), (5) Pro pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, (6) pro kesetaraan dan keadilan gender, (7) pro keberlanjutan sejarah dan kekayaan budaya lokal.

- g. Isu Kualitas Pelayanan Publik
- h. Pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi menjadi keharusan dan kebutuhan yang mendesak. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga, mendorong meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif.
- i. Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN
Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel yang mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, hubungan yang harmonis dan sinergis pemerintah daerah (birokrasi) dengan, dunia usaha (masyarakat ekonomi), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media diperlukan dalam reformasi birokrasi.

Guna mendukung pencapaian sasaran ke 4 dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2026 yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, Kecamatan Jumapolo menetapkan tujuan dan sasaran strategis sesuai isu strategis pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Target Akhir Renstra
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,91	72	73	75	75
		Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip	Nilai	68	72	73	74	74
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	Persen	Na	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Jumapolo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Repormasi Birokrasi	Indeks	86
		Meningkatnya kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	Persen	8,45
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75

Berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 tersebut perlu dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan yang perlu diambil dalam menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Tabel 2.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN JUMAPOLO TH 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	- Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
	- Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal	2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaa maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat	3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2025.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Jumapolo dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok

2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dok
3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	2 Unit
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>12 bulan</i>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 Nilai
1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan</i>	<i>12 Bulan</i>
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	1 Laporan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%
1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>12 Bulan</i>
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%

	UMUM		
1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	12 Bulan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%
1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	12 Bulan
1	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 Orang
2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%
1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa</i>	8 Dokumen
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan gambaran singkat mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Jumapolo dengan Bupati Karanganyar Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75

Tabel. 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jumapolo Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indek Repormasi Birokrasi	Indeks	86
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	%	8,03
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75

Berikut merupakan Program dan Kegiatan yang dilaksanan Kecamatan Jumapolo pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
----	--------------------	--------------------------------------	----------------	---------------

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.272.198.136
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%	5.0126.800
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	4.626.800
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dok	250.000
3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dok	250.000
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	12 Bulan	1.813.076.336
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	1.813.076.336
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	51.281.000
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	14.349.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	3.000.000
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	7.004.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	5.810.800
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.900.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.950.000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis	1 dokumen	555.000

		pada SKPD		
4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i>	<i>2 Unit</i>	<i>10.000.000</i>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>335.196.000</i>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	996.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.800.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	314.400.000
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>12 bulan</i>	<i>52.580.000</i>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	43.580.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 Nilai	2.750.000
1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>2.750.000</i>
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	1 Laporan	1.000.000

	Kecamatan	Wilayah Kecamatan		
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	1 Laporan	1.750.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	15.995.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	5.995.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.995.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Bulan	10.000.000
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	27.600.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Bulan	27.600.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.600.000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	63.060.000
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 Bulan	63.060.000
1	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 Orang	58.560.000

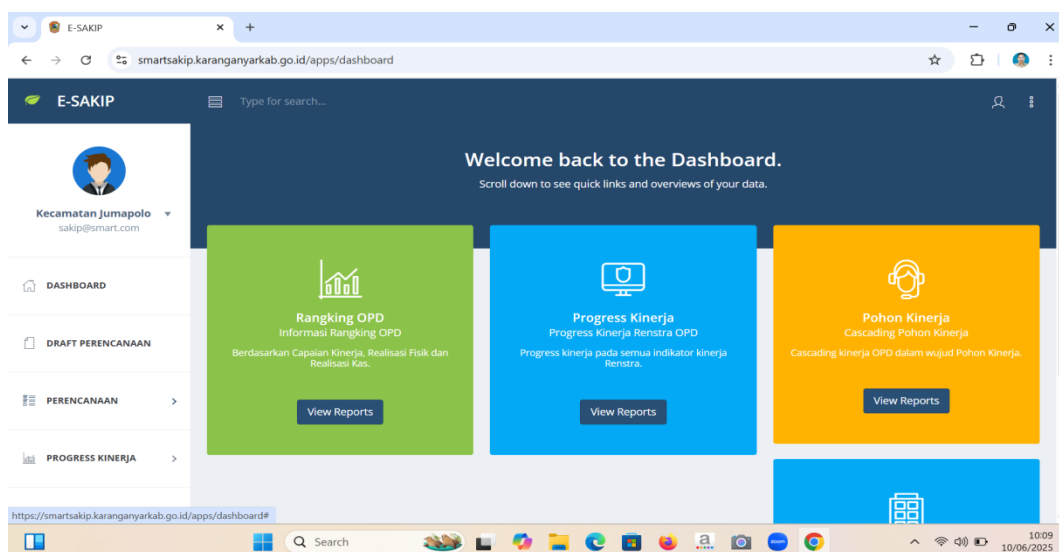
2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	4.500.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	13.710.000
1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa</i>	8 Dokumen	13.710.000
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2.100.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	9.750.000

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam menunjang capaian kinerja perlu adanya instrumen pendukung, instrumen yang digunakan sebagai acuan kinerja antara lain aplikasi smartsakip dari Kabupaten Karanganyar, e-sakip review dari Menpan RB

Gambar 2

Screenshot Aplikasi Smart Sakip dan ESR Menpan



The screenshot shows the 'e-SAKIP REVUI' dashboard. It features a sidebar with navigation links: Dashboard, FEATURES, Dokumen SAKIP, INTEGRASI, and FAQ. The main content area is titled 'Dashboard' and contains a table with 10 columns: OPD, Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja, and LHE AKIP Int. The table lists three rows of data for 'Badan Keuangan Daerah', 'Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar', and 'Baperlitbang'. Each cell in the table is currently empty, indicating a placeholder for data.

OPD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja	LHE AKIP Int.
Badan Keuangan Daerah									
Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar									
Baperlitbang									

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pendapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Jumapolo telah menggunakan indikaor kualitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk mencapai target dari masing-masing sasaran maka perlu diketahui efisiensi kinerja sasaran dan efisiensi penyerapan anggaran.

3.1.1. Skala Pengukuran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Istimewa
2	85 – 100%	Baik
3	60 – 85 %	Butuh Perbaikan
4	20 – 60 %	Kurang
	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Jumapolo tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jumapolo Tahun 2025 dengan Tujuan “Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi” dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sasaran Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 - 2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Laksanaan Pemerintahan” dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realiasi	Prosentase	
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi						
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	SAKIP	Nilai	73	71,05	97,33	74
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	IDM	Indeks	0,75	0,68	90.67	0,75

	Rata-rata	94	
--	-----------	----	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP diperoleh data dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 71,05 dan Indeks Desa Membangun (IDM) diperoleh data dari Kementerian Desa Republik Indonesia yaitu sebesar 0,68.

Apabila dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja pada Tahun 2025, Nilai SAKIP dengan Target sebesar 73 dengan realisasi sebesar 71,05 atau 97,33% dan IDM dengan target 0,75 dengan realisasi sebesar 0,68 atau 90,67%. Capaian kinerja terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi						
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Laksana Pemerintahan	SAKIP	73	71,05	97,33	Baik	LHE Inspektorat
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	IDM	0,75	0,68	90,67	Baik	Aplikasi Kementrian Desa

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Nilai SAKIP 97,33 dan IDM 90,67 sehingga rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 94 atau kategori **baik**.

3.1.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sesuai dengan dokumen Renstra 2024-2026, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar memiliki 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi” yang

kemudian diidentifikasi dengan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa.

Target indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan tahun 2023 sebesar 68,8, tahun 2024 sebesar 98,68 dan tahun 2025 sebesar 97,33. Realisasi indikator kinerja Sasaran tahun 2023 sebesar 68,8, tahun 2024 sebesar 71,05 (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya), dan realisasi tahun 2025 sebesar 71,05 (sama dengan tahun sebelumnya). Nilai indikator kinerja Sasaran meningkat sangat banyak daripada tahun 2023 sebelumnya meskipun nilai indikator kinerja sasaran lebih rendah, hal ini dikarenakan target sasaran lebih rendah dari tahun sebelumnya sesuai dengan perubahan acuan dari Renstra dari 2018 – 2023 menjadi Renstra 2024-2026, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sama yaitu 71,05 akan tetapi target pada tahun 2025 sebesar 73 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 72, sehingga prosentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 97,33% menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 98,68 %.

Sedangkan target indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa tahun 2023 sebesar 0,70, tahun 2024 sebesar 0,70 dan tahun 2025 sebesar 0,68. Realisasi indikator kinerja Sasaran tahun 2023 sebesar 0,70, tahun 2024 sebesar 0,701 (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya), dan realisasi tahun 2025 sebesar 0,68 (menurun dibandingkan tahun sebelumnya). Pada Capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 94 % lebih tinggi dibanding tahun 2023 yaitu 84,4% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 98,68%.

Realisasi dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %

1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi										
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Laksana Pemerintahan	SAKIP	100	68,8	68,8	72	71,05	98,68	73	71,05	97,33
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial										
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	IDM	0,7	0,70	100	0,75	0,70	93,47	0,75	0,68	90,67
	Rata-capaian Kinerja Sasaran				84,4			96,08			94

Rata-rata capaian kinerja sasaran mendukung ketercapaian kinerja tujuan. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 94% yang berarti bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 menurun dari tahun 2024 yaitu 96,08%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan memiliki nilai yang sama dengan tahun 2024 yaitu 71,05 sedang target kinerja sasaran pada Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan lebih tinggi dari tahun 2024 dengan nilai 72 sedang target tahun 2025 dengan nilai 73, juga pada capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa meskipun target sama dengan tahun 2024 yaitu 0,75 akan tetapi capaian pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 0,68 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 0,701.

3.1.4. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
----	----------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------

1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi				
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Laksana Pemerintahan	SAKIP	71,05	74	96,01
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	IDM	0,68	0,75	90,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan dengan indikator Nilai Sakip sebesar 71,05, capaian kinerja tujuan tersebut nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target indikator kinerja tujuan pada akhir periode renstra yaitu sebesar 74 dengan tingkat kemajuan 96,01%. Sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar 0,68, capaian kinerja sasaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target indikator sasaran pada periode akhir renstra yaitu sebesar 0,75 dengan tingkat kemajuan 90,67%.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.6

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025 dan Alternatif Solusi

No	Tujuan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi						

	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	71,05	74	97,33	Belum optimalnya pengelolaan manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja) di Kecamatan Jumapolo	Meningkatkan kualitas seluruh aspek di dalam pengelolaan manajemen kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Nilai IDM	0,68	0,75	90,67	Terjadinya penurunan nilai pada beberapa desa	Mengoptimalkan pendampingan ke desa baik dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan baik secara administrasi maupun pembangunan fisiknya

Dari tabel diatas, Kita dapat melihat bahwa ada kegagalan di dalam memenuhi indikator kinerja yang pertama yaitu nilai SAKIP Tahun 2025 masih dibawah target. Kemungkinan besar karena belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian akuntabilitas kinerja instansi termasuk belum liniernya keterkaitan antar dokumen tersebut satu dengan yang lainnya. Sementara itu, dalam mencapai indikator kinerja yang kedua yaitu Indeks Desa Membangun mengalami penurunan hasilnya karena ada penurunan sejumlah Desa mengalami penurunan indeks, kemungkinan besar dikarenakan faktor ekonomi sehingga salah satu tolak ukur penilaian yaitu ketahanan ekonomi mengalami penurunan .

3.1.6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang sudah direncanakan, direalisasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Realisasi anggaran dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efisien. Berdasarkan PMK No. 22/MK.02/2021, rumus untuk menghitung efisiensi adalah:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} = Efisiensi Output Program

AA = Alokasi Anggaran

RA = Realisasi Anggaran
 COP = Capaian Output Program
 N = Jumlah Sasaran

Penilaian evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi untuk mendapatkan nilai kinerja, seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0% - 100%.

Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Nilai efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi							
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Laksana	73	71,05	97,33	2.385.414.136,-	1.998.140.586,-	83,76	84,35

	Pemerintahan							
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	0,75	0,68	90,67	2.385.414.136,-	1.998.140.586,-	83,76	69,05

Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90% pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90% pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80% pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien; nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60% pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50% pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien. Penjelasan tabel 3.7 adalah sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan” adalah sebesar 84,35% yang berarti bahwa pagu anggaran Rp. 2.385.414.136,-, realisasi anggaran Rp. 1.998.140.586,- dan capaian kinerja 98,86% dengan nilai efisiensi 88,17% dikategorikan pelaksanaan anggaran **efisien**.
2. Nilai efisiensi penggunaan sumber daya kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa” adalah sebesar 69,04% yang berarti bahwa pagu anggaran Rp. 2.385.414.136,-, realisasi anggaran Rp. 1.998.140.586,- dan capaian kinerja 90,67% dengan nilai efisiensi 69,05% dikategorikan pelaksanaan anggaran **cukup efisien**.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.8

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi						

	Sasaran : Meningkatnya kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	97,33	Pogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	94	Menunjang
				Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,91	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	Menunjang
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						

	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Nilai IDM	90,67	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	100	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.385.414.136,- (*dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah*). Sedangkan program kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 6 program 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Dari total anggaran belanja terrealisasi sebesar Rp. 1.998.140.586,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) atau sebesar 83,76%, sisa anggaran Rp. 387.273.550,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 16,34%.

Berikut realisasi belanja Kecamatan Jumapolo pada tahun 2025 adalah sebagai :

Tabel. 3.9
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo Per Program dan Kegiatan
Tahun 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
-----	--------------------	------------------	-------------------	---

1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.272.198.136	1.886.004.586	83,00
1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.126.800	4.783.750	93,31
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.626.800	4.283.750	92,59
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	250.000	250.000	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	250.000	250.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.813.076.336	1.447.986.075	79,86
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.076.336	1.447.986.075	79,86
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.281.000	49.708.200	96,93
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
	2. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.105.000	13.957.200	98,95
	3. Penyediaan Perlengkapan RumahTangga	2.750.000	2.750.000	100
	4. Penyediaa Bahan Logistik Kantor	6.746.000	5.811.000	86,14
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.380.000	5.380.000	100
	6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	450.000	100
	7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18.700.000	18.210.000	97,38
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.150.000	1.150.000	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.850.000	12.100.000	87,36
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	13.850.000	12.100.000	87,36
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.750.000	323.323561	96,59
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	100
	2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	19.800.000	15.373.561	77,64
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.400.000	307.400.000	97,77
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.114.000	48.103.000	88,89
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	48.194.000	42.183.000	87,53
	2. Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	2.920.000	2.920.000	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	3.448.000	3.448.000	100

	Pelayanan Publik			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	3.448.000	3.448.000	100
	1. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	948.000	948.000	100
	2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.500.000	2.500.000	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.518.000	14.518.000	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.518.000	4.518.000	100
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4.518.000	4.518.000	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.850.000	27.850.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	27.850.000	27.850.000	100
	1. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.850.000	27.850.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	57.200.000	56.120.000	98,11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	57.200.000	56.120.000	99,05
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	54.200.000	53.120.000	98,01
	2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	3.000.000	3.000.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan	10.200.000	10.000.000	100

	Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.200.000	10.200.000	100
	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	100
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.700.000	7.700.000	100
	JUMLAH	2.385.141.136	1.998.140.586	83,76

3.3. Inovasi

Kecamatan Jumapolo tidak melaksanakan inovasi pada tahun anggaran 2025 dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada program maupun kegiatan terkait dengan inovasi.

3.4. Penghargaan

Pada tahun 2025 kecamatan Jumapolo tidak mempunyai penghargaan baik level kabupaten atau yang lebih tinggi

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Jumapolo telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata-rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 sebesar **94%**
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan sebesar 97,33 % (Baik)
3. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar 90,76 % (Baik)

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jumapolo hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jumapolo harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jumapolo di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi;
3. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi;

4. Menggunakan informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini untuk perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Jumapolo, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Jumapolo, Januari 2026



CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I

NIP. 19681020 199603 1 004

LAMPIRAN